

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan merupakan suatu langkah dalam membuat sesuatu yang belum ada menjadi ada atau membuat suatu perubahan yaitu membuat sesuatu menjadi lebih baik atau meningkat. Pembangunan Nasional yang berlandaskan pemerataan pembangunan dan hasilnya, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan stabilitas nasional yang sehat dan dinamis. Pembangunan secara tradisional dapat diartikan sebagai kapasitas dari sebuah perekonomian nasional yang kondisi ekonomi awalnya kurang lebih bersifat statis dalam kurun waktu yang cukup lama menuju peningkatan pendapatan nasional bruto atau GNI (*gross national income*) tahunan (Todaro, 2006). Pembangunan ekonomi juga dapat diartikan sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan perkapita penduduk suatu negara meningkat secara berkelanjutan dalam jangka panjang (Sadono, 2010).

Pada hakikatnya, pembangunan harus mencerminkan perubahan total dari suatu masyarakat atau penyesuaian sistem sosial secara keseluruhan tanpa mengabaikan keragaman kebutuhan dasar dan keinginan individu maupun kelompok-kelompok sosial yang ada di dalamnya. Pembangunan memiliki tujuan akhir yaitu bergerak maju menuju kondisi kehidupan yang lebih baik. Paradigma pembangunan yang sedang berkembang pada saat ini adalah pembangunan ekonomi yang diukur dengan pembangunan manusia (*human development*). Perubahan paradigma pembangunan pada dasarnya menjadikan manusia sebagai tujuan akhir pembangunan, bukan sebagai alat pembangunan. Pembangunan manusia menekankan terpenuhinya kehidupan yang layak bagi manusia, baik layak secara materi maupun non materi.

Salah satu tolak ukur yang digunakan dalam melihat kualitas hidup manusia adalah indeks pembangunan manusia (IPM) atau *human development index*. IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM diperkenalkan oleh United Nations Development Programme (UNDP) pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan Human Development Report (HDR). Adapun IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar yaitu Umur panjang dan hidup sehat, Pengetahuan, dan Standar hidup layak. IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk) karena dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara. Bagi Indonesia sendiri, IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja Pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU) (BPS, 2021).

Indonesia sebagai negara yang memiliki jumlah penduduk terbanyak keempat di dunia dan kaya akan sumber dayanya juga mempunyai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi bahkan menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani pertumbuhan ekonomi Indonesia termasuk tertinggi di dunia namun perkembangan IPMnya belum memuaskan meskipun sudah mengalami kenaikan belakangan ini mulai dari tahun 2015-2020 namun masih tergolong menengah/sedang. Ini menunjukkan bahwa pembangunan di Indonesia perlu mendapatkan perhatian yang lebih serius lagi kedepannya. Berikut perkembangan IPM di Indonesia dari tahun 2015 sampai 2020.

TABEL 1. 1
Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia
tahun 2015 sampai 2020

Tahun	IPM
2015	69,55
2016	70,18
2017	70,81
2018	71,39
2019	71,92
2020	71,94

Sumber: BPS 2020

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa tingkat pertumbuhan IPM dari tahun 2015 sampai 2020 mengalami peningkatan, walaupun peningkatannya tidak terlalu signifikan. Peningkatan IPM di Indonesia tidak disertai dengan pemerataan tingkat IPM di masing-masing provinsi di Indonesia. IPM di 34 provinsi di Indonesia masih mengalami perbedaan yang signifikan meskipun memang di beberapa IPM provinsi ikut mengalami peningkatan khususnya di Pulau Sumatera.

Pulau Sumatera sebagai salah satu pulau terbesar di Indonesia yang mempunyai 10 provinsi memiliki nilai IPM yang tidak jauh berbeda dari IPM nasional bahkan setengah provinsi di Pulau Sumatera nilai IPMnya berada di bawah IPM nasional. Tidak hanya itu perbedaan tingkat IPM dari masing-masing provinsi di Pulau Sumatera juga patut untuk mendapat perhatian. Pulau Sumatera yang terdiri dari 10 provinsi dengan luas 25,2 persen dari luas seluruh wilayah Indonesia dihuni oleh 21,3 persen penduduk atau 50,2 juta jiwa. Sumatera Utara yang memiliki kekayaan yang besar dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi seharusnya bisa menjadi modal untuk memperoleh IPM yang memuaskan

(BPS). Sumatera Utara merupakan salah satu provinsi yang memiliki 33 Kabupaten/Kota yang dilakukan dengan tujuan pemekaran wilayah. Adapun upaya pemekaran wilayah bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam memperkecil rentang kendali pemerintah sehingga meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan mempercepat pembangunan melalui peningkatan kualitas serta kemudahan dalam memperoleh pelayanan publik bagi masyarakat. Pelayanan publik yang baik dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Maka dari itu pemekaran wilayah berpengaruh sangat besar terhadap peningkatan angka kesejahteraan masyarakat.

Rata-rata tingkat IPM setiap provinsi di Sumatera Utara dari tahun 2015-2020 menunjukkan mengalami peningkatan. Tinggi rendahnya tingkat IPM tidak bisa dilepaskan dari peran berbagai lapisan pemerintah dan tugas masyarakat. Pertumbuhan ekonomi menjadi hal yang sering dikaitkan dengan pembangunan manusia. Salah satu tugas pembangunan yang terpenting adalah menerjemahkan pertumbuhan ekonomi menjadi meningkatkan pembangunan manusia. Untuk melihat seberapa besar pertumbuhan ekonomi pada suatu wilayah adalah dengan menghitung Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Berikut rata-rata IPM di Sumatera Utara dari tahun 2015-2020:

TABEL 1. 2
Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Sumatera Utara
tahun 2015 sampai 2020

Tahun	IPM
2015	69,51
2016	70,00
2017	70,57
2018	71,18

2019	71,74
2020	71,77

Sumber: BPS Sumut 2020

Pemerintah memiliki peran yang penting dalam mewujudkan pembangunan ekonomi melalui kebijakan fiskalnya. Diantara instrumen kebijakan fiskal tersebut adalah instrumen pengalokasian dana atau anggaran melalui APBN/APBD yang berkaitan dengan fasilitas publik seperti kesehatan dan pendidikan (Boediono, 2015). Pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan dan pendidikan diharapkan mampu untuk meningkatkan angka harapan hidup maupun menurunkan angka kematian ibu hamil dan kematian bayi sebagai suatu komponen dalam pembangunan manusia.

Pemerintah memiliki peran yang penting dalam mewujudkan pembangunan ekonomi melalui kebijakan fiskalnya. Diantara instrumen kebijakan fiskal tersebut adalah instrumen pengalokasian dana atau anggaran melalui APBN/APBD yang berkaitan dengan fasilitas publik seperti kesehatan dan pendidikan (Boediono, 2015). Pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan dan pendidikan diharapkan mampu untuk meningkatkan angka harapan hidup maupun menurunkan angka kematian ibu hamil dan kematian bayi sebagai suatu komponen dalam pembangunan manusia.

Dapat dilihat pada tabel 1.3 untuk indeks pembangunan manusia yang berada di kabupaten/kota di Sumatera Utara selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2020 kota Medan masih menjadi angka tertinggi dalam indeks pembangunan manusia sebesar 80,98 dan yang terendah di daerah Nias Barat sebesar 61,51. Pada tahun 2015 kota Medan juga mendapatkan nilai tertinggi sebesar 78,87 dan terendah berada di daerah Nias Barat sebesar 58,25.

Perkembangan IPM Kabupaten/kota di Sumatera Utara pada tabel berikut:

TABEL 1. 3
Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Sumatera Utara
tahun 2015 sampai 2020

No	Kabupaten/Kota	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Nias	58.85	59.75	60.21	60.82	61.65	61.93
2	Mandailing Natal	63.99	64.55	65.13	65,83	66.52	66.79
3	Tapanuli Selatan	67.63	68.04	68.69	69,10	69.75	70.12
4	Tapanuli Tengah	67.06	67.27	67.96	68.27	68.86	69.23
5	Tapanuli Utara	71.32	71.96	72.38	72.91	73.33	73.47
6	Toba Samosir	73.4	73.61	73.87	74.48	74.92	75.16
7	Labuhan Batu	70.23	70.5	71	71.39	71.94	72.01
8	Asahan	68.4	68.71	69.1	69.49	69.92	70.29
9	Simalungun	71.24	71.48	71.83	72.49	72.98	73.25
10	Dairi	69	69.61	70.36	70.89	71.42	71.57
11	Karo	72.69	73.29	73.53	73,91	74.25	74.43
12	Deli Serdang	72.79	73.51	73.94	74,92	75.43	75.44
13	Langkat	68.53	69.13	69.82	70.27	70.76	71
14	Nias Selatan	58.74	59.14	59.85	60,75	61.59	61.89
15	Humbang Hasundutan	66.03	66.56	67.3	67.96	68.83	68.87
16	Pakpak Barat	65.53	65.81	66.25	66.63	67.47	67.59
17	Samosir	68.43	68.82	69.43	69.99	70.55	70.63
18	Serdang Bedegai	68.01	68.77	69.16	69.69	70.21	70.24
19	Batu Bara	66.02	66.69	67.2	67.67	68.35	68.36
20	Padang Lawas Utara	67.35	68.05	68.34	68.77	69.29	69.85
21	Padang Lawas	65.99	66.23	66.82	67,59	68.16	68.25
22	Labuhan Batu Selatan	69.67	70.28	70.48	70.98	71.39	71.4
23	Labuhan Batu Utara	69.69	70.26	70.79	71.08	71.43	71.61
24	Nias Utara	59.88	60.23	6057	61,08	61.98	62.36
25	Nias Barat	58.25	59.03	59.56	60.42	61.14	61.51
26	Siboolga	71.64	72	72.28	72.65	73.41	73.63
27	Tanjungbalai	66.74	67.09	67.41	68	68.51	68.65
28	Pematangsiantar	76.34	76.9	77.54	77.88	78.57	78.75
29	Tebing Tinggi	72.81	73.58	73.9	74.5	75.08	75.17
30	Medan	78.87	79.34	79.98	80,65	80.97	80.98
31	Binjai	73.81	74.11	74.65	75.21	75.89	75.89
32	Padang Sidempuan	72.8	73.42	73.81	74.38	75.06	75.22
33	Gunungsitoli	66.41	66.85	67.68	68.33	69.3	69.31

Sumber: Badan Pusat Statistika Sumatera Utara

Indikator lain yang dapat mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia yaitu Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mencerminkan

persentase jumlah angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja (15 tahun ke atas). Penduduk usia kerja yang tergolong bukan angkatan kerja meliputi penduduk yang bersekolah, mengurus rumah tangga, dan melakukan kegiatan lainnya.

Pada dasarnya, setiap pemerintahan akan mengukur keberhasilan perekonomian daerahnya dengan berbagai indikator yang dianggap paling berpengaruh. Hal ini dilakukan untuk melihat kemampuan kerja elemen pemerintahan dan semua pihak yang berkepentingan dan yang paling utama yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015 – 2020”**

Manajemen Sumber daya manusia merupakan kekuatan terbesar dalam pengolahan seluruh resources yang ada dimuka bumi, karena pada dasarnya seluruh ciptaan Allah yang ada dimuka bumi ini sengaja diciptakan oleh Allah untuk kemaslahatan umat manusia. Hal ini sangat jelas telah ditegaskan oleh Allah Swt.:

وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan Dia menundukkan untukmu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi semuanya, (sebagai rahmat) daripada-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang berpikir.
(Q.S. Al-Jatsiyah: 13)

Oleh karena itu sumber daya yang ada ini harus dikelola dengan benar karena itu merupakan amanah yang akan dimintai pertanggungjawabannya kelak. Untuk mendapatkan pengelolaan yang baik ilmu sangatlah diperlukan untuk menopang pemberdayaan dan optimalisasi manfaat sumber daya yang ada. Di dalam surah Ar-Rohman ayat ke 33, Allah

telah menganjurkan manusia untuk menuntut ilmu seluas-luasnya tanpa batas dalam rangka membuktikan kemahakuasaan Allah SWT.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka diperoleh perumusan masalah untuk penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Sumatera Utara?
2. Bagaimana pengaruh APBD untuk pendidikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Sumatera Utara?
3. Bagaimana pengaruh APBD untuk kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Sumatera Utara?
4. Bagaimana pengaruh tingkat partisipasi angkatan kerja terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Sumatera Utara?

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas maka diperoleh tujuan dilakukannya penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Sumatera Utara
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengaruh APBD untuk pendidikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Sumatera Utara
3. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengaruh APBD untuk kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Sumatera Utara

4. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengaruh tingkat partisipasi angkatan kerja terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Sumatera Utara.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat:

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi ilmu pengetahuan dan perkembangan ilmu ekonomi sekaligus menjadi bahan acuan bagi penelitian yang akan dilakukan selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Perusahaan, hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan referensi dalam melakukan evaluasi kinerja terkait pertumbuhan perekonomian serta memberikan gambaran mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
- b. Bagi peneliti, penelitian ini merupakan sarana untuk berlatih dalam pengembangan ilmu pengetahuan serta menambah wawasan penulis agar berfikir secara kritis dan sistematis dalam menghadapi permasalahan yang berkaitan dengan Indeks Pembangunan Manusia.
- c. Bagi pembaca, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi sebagai tambahan referensi untuk penelitian selanjutnya yang berhubungan.